2015 Jogja
Macet Total
Dari Kampanye,
PEMILU,
Hingga
DEMOKRASI
JOKOWI
HARAM MASUK
WARGA
TOLAK
Book Project
Impulse #2

Dari Kampanye, Pemilu, Hingga Demokrasi

Pustaka Pribadi
Weldemina Yudit Tiwery

Peserta Book Project "Demokrasi"

pintal
IMPULSE

Dari Kampanye, Pemilu, Hingga Demokrasi
030814
@ Pintal 2014

PINTAL
Jl. Kaliurang Km 5, Gang Pocung 3, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 7101997, 087739184496.
Email : bukupintal@gmail.com
Facebook : Buku Pintal

Impulse
Jl. Kaliurang Km 5, Gang Pocung 3, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 7101997, 087739184496.
Email : impulse.jogja@gmail.com
Facebook : Impulse Jogja

Cetakan ke-	4	3	2	1
	17	16	15	14

ISBN : 978-602-7797-43-7

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh Percetakan Kanisius Yogyakarta

Daftar Isi

Pengantar Redaksi: Ketika Rasionalitas Terbeli 1

***Chapter* I**

Pengantar: Wajah Demokrasi Kita 4

Menegakkan Kebebasan dalam Demokrasi 7

Demokrasi Miskin Etika 15

***Chapter* II**

Pengantar: Pelanggaran, Kemunafikan, dan Budaya Patriarki Kampanye 26

Sampah Visual Demokrasi 32

Erotisme dan Erorr (isme) Pesta Demokrasi Kita 47

Wujudkan Kampanye Cerdas! 61

Chapter III

Pengantar: Dinamika Pemilih : Mengapa Golput 68

Kepribadian Penentu Preferensi Pemilih 73

Partisipasi Pemilih Luar Negeri 82

Mahasiswa Pantang Golput 92

Refleksi 100

Belajar Demokrasi Berantas Korupsi 101

Pengantar Redaksi

KETIKA RASIONALITAS TERBELI

Hiruk pikuk massa dalam kampanye terbuka adalah rutinitas lima tahun sekali ketika Pemilihan Umum (Pemilu) digelar. Setiap kali partai politik menggelar kampanye terbuka, ratusan hingga ribuan massa terjun dalam euforia. Masyarakat beramai-ramai meninggalkan sejenak rutinitas demi mengikuti kampanye terbuka di ruang publik. Mereka merayakan pesta demokrasi lima tahunan ini di ruang publik dengan satu kekhasan; konvoi sepeda motor berknalpot potongan hingga menimbulkan bunyi sangat keras. Bak orkestra, massa kampanye kompak menggeber knalpot itu dengan irama tertentu.

Mengamati euforia massa setiap kali Pemilu digelar, bisa dimaknai bila pesta demokrasi ini identik

dengan pengerahan massa. Para petinggi Partai Politik (Parpol) mungkin bangga ketika berhasil mengerahkan banyak massa. Tak peduli caranya menggaet ribuan massa itu. Konon, ada praktik politik uang partai tertentu dengan menawari sejumlah duit agar orang mau memeriahkan kampanye terbuka.

Sebenarnya, pengerahan massa dengan imbalan sejumlah duit, bukan identitas sejati pesta demokrasi. Hal itu merusak esensi sistem demokrasi sebagai penjamin kebebasan individu karena seseorang yang mau menerima duit beserta konsekuensi harus hadir dalam kampanye, kebebasannya telah terbeli. Rasionalitas individu mereka, terkotori oleh logika transaksional. Logika transaksional itu adalah warisan tradisi komunal –di mana elite menundukan masyarakat secara massif-bercampur dengan sifat materialistis masyarakat yang timbul akibat himpitan ekonomi. Rasionalitas individu bisa diakali oleh uang. Padahal, esensi sistem politik

demokrasi harus berjalan dengan landasan rasionalitas individu tanpa pengaruh darimana pun, termasuk kuasa uang. Sehingga mengarah pada terbentuknya masyarakat sipil berkesadaran. Sadar akan hak individu maupun kewajiban sebagai warga negara.

Kualitas demokrasi, dilihat dari kesadaran masing-masing warganya akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berarti kuantitas massa yang turut serta dalam kampanye terbuka, bukan tolok ukur keberhasilan demokrasi. Apalagi, bila dalam konteks Pemilu, keikutsertaan massa untuk memilih hanya menghasilkan pemimpin korup dan tidak cakap. Jadi, pembaca sekalian silahkan menilai, apakah demokrasi kita berkualitas atau sedang karut marut? Dan, merayakan pesta demokrasi apakah harus selalu dengan pengerahan massa? Betapapun di akar rumput watak komunalisme masih terasa hingga kini.

Chapter I

WAJAH DEMOKRASI KITA

Untuk menakar kualitas demokrasi, khususnya di negara kita, bisa dengan membaca tulisan Kholila Mukaromah dan Weldemina Yudit Tiwery dalam *chapter* 1 buku ini. Kholila membahas penegakan kebebasan dalam demokratisasi, sedangkan Yudit mengulas tentang etika berdemokrasi.

Menurut Kholila, berbicara mengenai demokrasi, maka ia berkaitan erat dengan konsep kebebasan sipil. Kebebasan atau hak-hak sipil menjadi *icon* dari peran positif negara dalam menjamin perlindungan hukum dan kesempatan yang setara bagi semua warga negara tanpa memandang ras, agama, serta jenis kelamin. Kebebasan sipil secara konseptual telah disusun dalam konstitusi Indonesia. Di antara yang dimaksud: kebebasan berpendapat, kebebasan

berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama, serta kebebasan pers. Tidak berlebihan jika dikatakan berjalannya demokrasi di indonesia bergantung pada tegaknya hak-hak sipil tersebut.

Sayangnya, yang terjadi justru represi atas hak sipil. Pemberitaan media tentang diskriminasi terhadap etnik dan pemeluk agama minoritas, cukup membuktikan betapa mahal kebebasan di negeri ini. Beberapa kalangan seperti warga ahmadiyah, jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, tidak bisa menikmati kebebasan yang paling hakiki; beribadah. Walhasil, mahalnya kebebasan menjadi salah satu noda yang memburamkan wajah demokrasi kita.

Kemudian pada tulisan selanjutnya, Yudit mengulas bahwa nilai-nilai sejati demokrasi yang mengutamakan rakyat hanya sebatas tataran konseptualnya saja sementara pada praksisnya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam tiap implementasi program, mereka tetap termarginal dan

terdepak ke wilayah *pheriferi* kemiskinan. Dunia politik yang dipertontonkan penuh dengan kebohongan, kekerasan, kemunafikan dan ketidaksantunan. Ada semacam tradisi kebohongan dalam wujud janji-janji palsu yang dipraktekkan partai dan para politisi dan terjadi berulang-ulang di setiap kali pesta demokrasi dilaksanakan.

Singkatnya, Yudit ingin berkata, "pemimpin itu munafik". Karenanya, mereka telah mengenyahkan etika dalam demokrasi. Alhasil, demokrasi berjalan tanpa etika. Di mana banyak pejabat negara mengakali konstitusi agar bisa bebas dari jerat hukuman korupsi, sembari membentuk watak transaksional masyarakat ketika Pemilu digelar. Hal ini semakin menambah daftar *record* buruk pemerintah, yang kian memburamkan wajah demokrasi kita.

Pustaka Pribadi
Waterminya Yadit
Tiwery

MENEGAKKAN KEBEBASAN DALAM DEMOKRASI

Oleh : Kholila Mukaromah

Mahasiswi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Jurusan Studi Al-Qur'an-Hadis

Dunia perpolitikan Indonesia sudah cukup familiar dengan praktek politik uang menjelang diadakannya pemilihan umum. Pun konflik atas nama agama yang terancam mengikis sisi humanisme. Sebutlah konflik antar Syiah-Sunni di Sampang yang bermula dari persoalan keluarga; masalah perizinan tempat beribadah di GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia; hingga tindakan *sweeping* yang dilakukan sejumlah organisasi massa. Kiranya persoalan inilah yang kerap membanjiri media pemberitaan Indonesia pasca reformasi. Begitu juga media pemberitaan saat ini dipenuhi dengan berbagai berita tentang prestasi

Daftar pustaka

Freedom institute. Ed. Basyaib, hamid. *Membela Kebebasan : Percakapan tentang demokkrasi Liberal.*Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006.

Thaha, Idris. *Demokrasi Religius.*Bandung: Teraju. 2005.

DEMOKRASI MISKIN ETIKA

Weldemina Yudit Tiwery[1]

Tahun 2014, Indonesia melakukan dua kali pemilihan umum yang menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan. Pemilihan tahap pertama adalah pemilu legislatif berlangsung tanggal 9 April 2014 untuk memilih anggota parlemen yakni DPRD,DPR dan DPD. Pemilu yang ke dua adalah untuk memilih presiden yang akan berlaangsung pada 9 Juli 2014. Pemilu di Indonesia lebih sering disebut sebagai pesta demokrasi sehingga suksesnya pemilu akan dianggap sebagai suksesnya demokrasi di Indonesia.

Perjalanan sejarah demokrasi *"demos-cratein* telah melalui lintasan sejarah yang cukup panjang di dunia Barat yang bermula dari tirani kerajaan –

[1] Penulis adalah Dosen pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon, saat ini sedang studi di Program Pascasarjana Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta.

oligarki elite/ partai - barulah kemudian melahirkan revolusi sosial sampai terbentuk demokrasi seperti yang kita kenal sekarang ini. (David Held, 1996.:296-305). Revolusi sosial itu terjadi pada tahun 1760-1800 ketika di Amerika dan Eropa sistem kekuasaan seperti monokrasi, aristokrasi,oligarki dan plutokrasi diubah menjadi kekuasaan yang berasal dari kehendak rakyat. Sebuah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada periode itu, di Amerika dan Eropa sistem kekuasaan pemerintahan seperti monarki, atau aristokrasi, plutokrasi, oligarki semuanya diruntuhkan dan diubah menjadi sebuah sistem kekuasaan yang diasumsikan berasal dari dan kehendak rakyat. Disebut demokrasi, karena pemerintahan yang dilahirkan dari proses tersebut atas kekuasaan rakyat, rakyatlah yang berkuasa menentukan pemimpinnya atau pemerintahan berasaskan kedaulatan rakyat.

Demokrasi di dunia Barat, orang-orang (keanggotaan) yang duduk di Parlemen, Kongres dan Dewan Perwakilan dipilih melalui Pemilihan Umum. Model inilah yang dianggap sebagai representasi simbol perwakilan rakyat. Untuk sampai pada tahapan menentukan keanggotaan di parlemen, kongres dan dewan perwakilan, diaturlah mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum, yang menghasilkan sebuah kekuasaan pemerintahan atas nama rakyat, seperti: Monarki konstitusional, dengan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen atau wakil rakyat.

Tentu saja, sasaran yang ingin dicapai melalui sistem demokrasi adalah terbentuknya pemerintahan yang didukung oleh mayoritas rakyat sebagai peserta/pemilih, sehingga disebut Pemerintahan yang demokratis. Melalui pemilihan umum, rakyat ikut menentukan pilihannya secara bebas atas nama demokrasi melalui partai politik untuk kemudian

menentukan perwakilannya di parlemen maupun pemerintahan. Sistem-sistem demokrasi seperti itulah yang dianggap baik dan tepat untuk diterapkan di negara Republik Indonesia. Bangkitnya demokrasi di Indonesia, ditandai dengan pelaksanaan pemilu tahun 1955, banyak yang mengatakan inilah demokrasi leiberal yang dimiliki Indonesia dan setelah periode 1955, rezim Orde Baru berkuasa dengan menggunakan nama demokrasi Pancasila tetapi pada kenyataannya, Pemerintah lebih dominan dari rakyat. Pemilu hanyalah sebuah pesta tanpa makna sebab sebelum usai pemilu, rakyat sudah tahu partai pemenangnya adalah partai pemerintah.

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, sistem demokrasi Indonesia bangkit dengan semangat refiormasi. Namun apa yang diharapkan tetap saja masih jauh dari harapan. Realitas demokrasi di era reformasi yang diharapkan lebih baik dan santun,

justru berbanding terbalik dengan konsep demokrasi yang sesungguhnya.

Sejatinya, demokrasi bukanlah sesuatu yang abstrak, bukan sekedar slogan tanpa makna. Demokrasi adalah *action,* sebuah kegiatan, sebuah aksi nyata. Di dalam pelaksanaan demokrasi, ada banyak elemen yang membuatnya bernilai, misalnya; kebudayaan yang demokratis, kebebasan pers, struktur sosial yang stabil, keseimbangan lembaga-lembaga demokratis di dalam masyarakat, ekonomi yang bebas dan stabil, pengadilan yang independen, lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan yang memberikan akses merata dan adil kepada semua rakyat, demikian pula lembaga agama yang menjunjung martabat manusia dan menghormati kebebasan. (Ruhulessin, 2007: 63). Dalam demokrasi, ada *check and balances* yaitu serangkaian pengaturan sistem nilai yang mencegah pemerintah atau negara dalam monopoli kekuasaan, sebaliknya memosisikan kekuatan peran

dan emansipasi politik rakyat. Rakyatlah yang memunyai kekuatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan politik publik. Rakyat bukan sekedar penggembira dalam suatu pesta demokrasi melainkan memegang peranan penting dalam proses berdemokrasi.

Oleh karena kesadaran akan pentingnya rakyat, maka para politisi, calon legislatif yang diusung partai peserta pemilu berlomba-lomba mencari dukungan publik/rakyat, berbagai pendekatan dilakukan baik dengan turun langsung ke dalam masyarakat maupun melalui iklan-iklan media namun sayangnya banyak kali cara-cara yang digunakan tidak santun, jauh dari ekspektasi masyarakat.

Hal ini nampak dari perilaku para politisi dan calon legislatif yang pada saat-saat kampanye, berpura-pura dekat dengan rakyat, berjalan memasuki setiap sudut kota dan desa dengan senyum dan keramahan sesaat, berpura-pura peduli dan baik hati dengan

memberikan sumbangan uang dan sembako, mengumbar janji-janji manis namun sifatnya hanya sesaat. Rakyat sudah paham bahwa ketika mereka terpilih, rakyat ditinggalkan berjuang sendirian dalam mempertahankan kehidupan mereka sementara para wakilnya hidup bergelimangan fasilitas mewah (hedonis) dengan mental korup.

Kampanye secara langsung dilaksanakan mestinya sebagai media pencerdasan rakyat justru berlangsung dalam pawai yang ugal-ugalan di jalanan umum, materi kampanye kebanyakan saling menghujat, menjatuhkan pasangan satu dengan yang lain, bahkan kerap kali mengusung isu sara, bukan sebaliknya mencerdaskan rakyat dengan menawarkan program yang bermanfaat bagi kesejahteraan. Para caleg dan pemimpin partai mempromosikan diri seolah-olah merekalah orang maha pintar, maha baik, hebat, jujur, peduli dan bersih, sanggup menyelesaikan persoalan bangsa ini dalam kurun waktu singkat,

padahal sesungguhnya rakyat pun tahu bahwa *track record* mereka ada yang pernah bersinggungan dengan pelanggaran HAM, ada yang pernah dipenjarakan beberapa saat karena korupsi, dan ada pula yang selama menjadi wakil rakyat, jarang melaksanakan tugas.

Bila konsep demokrasi idealnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sudah selayaknya pula kepentingan rakyat yang diutamakan. Namun tampaknya, harapan itu masih jauh dari kenyataan. Cara memobilisasai masa di jalan raya, cara menyampaikan program dalam kampanye kebanyakan tidak menampilkan nilai etika yang santun dan saling menghargai. Kemiskinan dan penderitaan rakyat dieksploitasi dalam materi kampanye, visualisasi rakyat kecil seperti petani, nelayan dan anak-anak sekolah dalam iklan kampanye hanya sekedar untuk mengefektifkan pesan para kandidat caleg dan capres yang hendak disampaikan, bukan karena niat dan

kepedulian yang sungguh untuk menolong mereka dari kesulitan hidup. Pada masa kampanye, rakyat yang miskin dan tertindas dijadikan sebagai isu yang seksi untuk dituntaskan segera setelah dipilih namun ketika sudah terpilih, realitas kemiskinan itu pun senyap dalam hiruk pikuk pementingan diri dan partai lalu kemudian absen dalam pertimbangan dan keputusan-keputusan pembangunan. Bila ada perhatian para elite politik terhadap nasib rakyat miskin dan tertindas, itu dilakukan hanya sebagai pencitraan untuk meningkatkan popularitas.

Nilai-nilai sejati demokrasi yang mengutamakan rakyat hanya sebatas tataran konseptualnya saja sementara pada praksisnya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam tiap implementasi program, mereka tetap termarginal dan terdepak ke wilayah pheriferi kemiskinan. Dunia politik yang dipertontonkan penuh dengan kebohongan, kekerasan, kemunafikan dan ketidaksantunan. Ada

semacam tradisi kebohongan dalam wujud janji-janji palsu yang dipraktekkan partai dan para politisi dan terjadi berulang-ulang di setiap kali pesta demokrasi dilaksanakan.

Dialog-dialog publik yang dilakukan oleh para politisi baik secara langsung maupun melalui media massa lebih menonjolkan sisi emosionalitas yang nampak dalam bahasa-bahasa kekerasan yang saling menyerang bukan sebaliknya saling mendukung. Para politisi terkenal berani berbohong kepada publik, sebagai contoh; ada bebrapa politisi yang berani bersumpah kalau mereka tidak melakukan penyelewengan terhadap mandat rakyat, namun pada akhirnya sudah menjadi tersangka bahkan terdakwa dan kini berada dalam rumah tahanan. Perilaku seperti ini adalah pengkhianatan demokrasi, pengkhianatan terhadap pemegang kedaulatan yakni rakyat. Kalau sudah seperti ini, maka benarlah apa yang dikatakan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Mahfud

MD dalam sebuah dialog di metro TV pada saat pemilu legislatif 9 April 2014: Mahfud mengatakan, hasil pemilu pada saat ini adalah proses pengadilan rakyat. Rakyat yang mengadili dan memutuskan, siapa dan partai mana yang di pilih dan siapa dan partai mana yang diabaikan rakyat.

Saatnya rakyat cerdas, memilih dengan cerdas pemimpin yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan cerdas sosial.

Daftar pustaka

David Held, *Models of Democracy,* California, Stanford University Press, 1996.

Ruhulessin John Chr; *Pluralisme Berwajah Humanis*, LESMMU, bekerjasama dengan Galang Press, Yogyakarta, 2007

Pengerahan massa dengan imbalan sejumlah duit, bukan identitas sejati pesta demokrasi. Hal itu merusak esensi sistem demokrasi sebagai penjamin kebebasan individu karena seseorang yang mau menerima duit beserta konsekuensi harus hadir dalam kampanye, kebebasannya telah terbeli. Rasionalitas individu mereka, terkotori oleh logika transaksional.

Rasionalitas individu bisa diakali oleh uang. Padahal, esensi sistem politik demokrasi harus berjalan dengan landasan rasionalitas individu tanpa pengaruh darimana pun, termasuk kuasa uang. Sehingga mengarah pada terbentuknya masyarakat sipil berkesadaran. Sadar akan hak individu maupun kewajiban sebagai warga negara.

---

pintal

Jl.Kaliurang Km 5, Gang Pocung No. 3, Sleman, Yogyakarta, 55281, Indonesia.

Telepon : (0274) 7101997
Email : bukupintal@gmail.com
Facebook : Buku Pintal

ISBN 9786027797437

9 786027 797437